



ISSN:  
2655-6944

# ELASTISITAS

<http://elastisitas.unram.ac.id>

## Jurnal Ekonomi Pembangunan

Vol. 6, No. 2, September 2024

### DAMPAK PAJAK DAERAH, HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN LABA BUMD TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI NTB

Dewi Mahasarani<sup>1</sup>, Muaidy Yasin<sup>2</sup>, Ahmad Zaenal Wafik<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Universitas Mataram, Indonesia

#### Info Artikel

**Kata Kunci:**  
Pajak Daerah,  
Hasil Pengelolaan Kekayaan  
Daerah yang Dipisahkan,  
BUMD, Pendapatan Asli  
Daerah

#### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki sebagian dan secara bersamaan pengaruh pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan laba BUMD terhadap penerimaan asli daerah (PAD) di Nusa Tenggara Barat untuk tahun 2008–2022. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi subjek penelitian ini. Jenis studi ini bersifat kuantitatif dan memanfaatkan data sekunder, atau statistik keuangan pemerintah provinsi, dari Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah regresi linier berganda, asumsi klasik, uji T, dan uji F. Menurut hasil tes, PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat terdampak oleh sebagian pajak daerah. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang terpecah tidak berdampak nyata pada PAD. Sementara pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang berbeda, dan laba BUMD memiliki dampak yang signifikan terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan pengaruh masing-masing sebesar 99,4% dan 6% tergantung pada faktor lain yang tidak tercantum dalam penelitian ini, laba BUMD tidak berdampak signifikan terhadap PAD di provinsi tersebut.

#### ABSTRACT

**Keywords:**  
Regional Tax, Results of  
Separated Regional Wealth  
Management, BUMD  
Regional Original Revenue

The purpose of this study is to partially and simultaneously investigate the influence of regional taxes, the results of segregated regional wealth management, and BUMD profits on regional original revenue (PAD) in West Nusa Tenggara for the years 2008–2022. The Provincial Government of West Nusa Tenggara is the subject of this research. This kind of study is quantitative and uses secondary data from the Central Statistics Agency (BPS) of West Nusa Tenggara, which is the financial statistics of the provincial government. The time series data were analyzed in this work using the following techniques: multiple linear regression, classical assumption, T test, and F test. According to the test results, the PAD of West Nusa Tenggara Province was greatly affected by some local taxes. In West Nusa Tenggara Province, the results of the divided regional wealth management do not have a real impact on PAD. Meanwhile, regional taxes, the results of different regional wealth management, and BUMD profits have a significant impact on the PAD of Province.

## 1. PENDAHULUAN

Pemberlakuan otonomi daerah membuat setiap wilayah mempunyai kewenangan sendiri dalam Mengendalikan serta mengelola seluruh urusan pemerintahan daerah layaknya seperti yang diatur oleh undang-undang. Dengan kata lain, wilayah ini memiliki kekuatan untuk mengembangkan kebijakan daerah yang akan meningkatkan dan menghasilkan kesejahteraan masyarakat. (Ardiyanti et al., 2022).

Implementasi otonomi daerah Indonesia berpotensi untuk memberdayakan pemerintah daerah untuk meningkatkan dan mengembangkan daerahnya sendiri dan menyusun strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah secara keseluruhan. Peningkatan PAD adalah indikator utama keberhasilan suatu wilayah (Siregar & Kusmilawaty, 2022). Pendapatan yang diterima suatu daerah dari sumber daya dan kekayaan yang dikelola oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan, seperti pajak daerah, pungutan daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD hukum lainnya (Suharyadi et al., 2018). Untuk memastikan bahwa suatu daerah tidak selalu bergantung pada subsidi dari pemerintah federal, pembiayaan PAD adalah salah satu sumber utama pembangunan daerah (Pamungkas et al., 2023). Selain itu, karena Badan Usaha Milik Negara (BUMD) termasuk dalam kategorisasi PAD yang sah, BUMD juga berdampak pada PAD (Dewi & Ratnawati, 2023).

Salah satu bagian penting dari PAD merupakan pajak daerah yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah serta dimanfaatkan guna menunjang kehidupan warga daerahnya. Dampak pajak daerah adalah dapat meningkatkan kapasitas penerimaan PAD serta memacu perkembangan ekonomi daerah. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung PAD dalam hal kepentingan universal dan pelaksanaannya, diharapkan tarif dan penerimaan pajak daerah (Dona et al., 2022).

Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah”, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. PAD tidak hanya berasal dari pajak dan retribusi, tetapi juga mencakup pendapatan dari perusahaan daerah (BUMD) serta hasil pengelolaan aset-aset daerah yang dimiliki secara langsung. PAD ini berasal dari keuntungan BPR-BKK, perusahaan lokal, BPD, dan investasi daerah di pihak lain memberikan pendapatan ini. (Hafandi & Romandhon, 2020).

NTB memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD dari berbagai sektor. Kemampuan suatu daerah untuk mendukung industri dasar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berdampak positif pada pembangunan ekonomi (Dira et al., 2023). Beberapa sektor andalan daerah, seperti pariwisata dan pertambangan, bisa jadi sumber utama peningkatan PAD. Pajak hotel, restoran, hiburan, dan objek wisata lainnya yang berasal dari sektor pariwisata dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah, Sektor pertanian, terutama dari komoditas seperti tembakau dan kopi, berpotensi meningkatkan PAD melalui pajak produknya. Luasnya garis pantai NTB menjadikan sektor perikanan dan pariwisata bahari sebagai kontributor utama Pendapatan Asli Daerah, terutama melalui pajak perikanan dan kunjungan wisatawan. Sektor pertambangan juga berpotensi menyumbang PAD dari pajak bumi bangunan, pajak penghasilan Perusahaan (PPh Badan) dari Perusahaan pertambangan, pajak produksi, dan bagi hasil produksi. Perikanan, kerajinan tangan, dan pengolahan hasil pertanian merupakan sektor prospektif di sektor industri Nusa Tenggara Barat. PAD disediakan oleh sektor industri melalui penerimaan pajak penghasilan dan pajak perdagangan (Subarkah, 2018).

Pertumbuhan PAD di Provinsi NTB menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Capaian tertinggi kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah tercatat pada tahun 2015, yakni sebesar 95%. Akan tetapi, pada tahun 2017 terjadi penurunan signifikan menjadi 47%, di bawah ambang batas yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Provinsi NTB masih belum mencapai tingkat kemandirian yang diinginkan (Wahidin et al., 2021). Secara teoritis, pemerintah daerah menjadi kurang bergantung pada pemerintah federal semakin banyak PAD

berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Dibayangkan bahwa pemerintah daerah dapat menjadi lebih mandiri secara finansial dari daerah mengingat kontribusi PAD yang signifikan terhadap pendapatan daerah (Berutu & Erasashanti, 2023).

Tabel 1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penerimaan Daerah Tahun 2008-2022

Tahun	Jenis penerimaan (Dalam Ribuan)		Kontribusi (%)
	PAD	Dana Perimbangan	
2008	430.222.359	626.994.173	69
2009	468.210.246	771.690.510	61
2010	515.340.957	756.256.439	68
2011	741.291.175	855.310.099	87
2012	745.979.811	1.054.470.183	71
2013	858.454.205	1.187.576.718	72
2014	1.115.060.397	1.212.086.447	92
2015	1.374.165.767	1.450.695.265	95
2016	1.359.844.019	2.585.032.590	53
2017	1.501.609.334	3.222.521.203	47
2018	1.660.417.707	3.212.386.690	52
2019	1.807.482.746	3.342.865.637	54
2020	1.815.690.082	3.359.548.334	54
2021	1.954.341.221	3.394.625.397	58
2022	2.292.065.853	3.414.313.104	67

Sumber: BPS 2008-2022

Seperti yang dapat dilihat dari uraian latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerimaan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan laba BUMD berdampak pada PAD.

## 2. METODOLOGI

### Jenis Penelitian dan Sumber Data

Metode penelitian ini ialah kuantitatif. Artinya, penelitian ini menarik kesimpulan berdasarkan data angka yang diperoleh dari pengukuran langsung (Aksara, 2021). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber informasi yang diperoleh dari penelitian sebelumnya atau sumber-sumber lain.

### Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dokumen-dokumen dari Badan Pusat Statistik Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPS NTB) tahun 2008-2022 sebagai sumber data utama. Dokumen-dokumen ini, seperti laporan keuangan BUMN dan BUMD serta statistik keuangan pemerintah provinsi, digunakan untuk mendukung temuan penelitian.

### Metode Analisis Data

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis data berupa uji T, uji F, regresi linier berganda, serta pengujian terhadap asumsi klasik.

Dengan persamaan model analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \mu$$

Dimana:

Y =Pendapatan Asli Daerah

$\beta_0$ =Konstanta

$\beta_1$ =Koefisien regresi variabel Pajak Daerah (X1)

$\beta_2$ =Koefisien regresi variabel hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X2)

$\beta_3$ =Koefisien regresi variabel BUMD (X3)

X1=Variabel Pajak Daerah

X2=Variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

X3=Variabel Laba BUMD

$\mu$  =Error term (standar error)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk memastikan bagaimana pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan pendapatan dari BUMD akan mempengaruhi pendapatan asli daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat antara tahun 2008 dan 2022.

### Hasil Uji Asumsi Klasik

Secara umum, mengevaluasi asumsi klasik datang sebelum menguji analisis regresi linier berganda. Uji multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedasitas, dan normalitas adalah contoh uji asumsi tradisional. Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors

Date: 09/02/24 Time: 11:57

Sample: 2008 2022

Included observations: 15

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	2.08E+15	15.00562	NA
X1	0.001153	8.805261	1.548866
X3	99031.49	26.64386	1.854706
X2	0.242813	7.738535	1.248612

Mengingat bahwa nilai VIF variabel independen kurang dari 10.00, dapat dikatakan bahwa asumsi uji multikolinearitas telah terpenuhi atau tidak ada tanda-tanda multikolinearitas dalam variabel penelitian.

### a. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	2.554726	Prob. F(2,9)	0.1322
Obs*R-squared	5.431946	Prob. Chi-Square(2)	0.0661

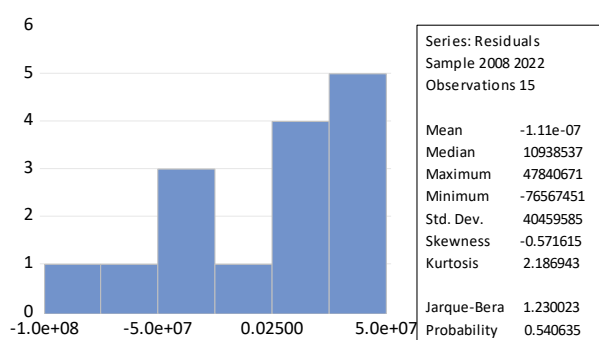
Ditetapkan bahwa nilai prob.  $0.0661 > 0.05$  artinya data telah melewati uji autokorelasi atau asumsi uji autokorelasi telah terpenuhi.

Heteroskedasticity Test: White  
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.990697	Prob. F(9,5)	0.5350
Obs*R-squared	9.610628	Prob. Chi-Square(9)	0.3829
Scaled explained SS	3.067288	Prob. Chi-Square(9)	0.9616

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, diperoleh nilai probabilitas sebesar  $0.3829 > 0.05$  yang umum digunakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.

#### b. Uji Normalitas



Hasil uji normalitas menunjukkan nilai probabilitas sebesar  $0.540 > 0.05$  maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal.

#### Hasil Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: Y  
Method: Least Squares  
Date: 09/02/24 Time: 12:02  
Sample: 2008 2022  
Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	1.344158	0.033962	39.57838	0.0000
X2	0.691980	0.492761	1.404293	0.1878
X3	-294.3425	314.6927	-0.935333	0.3697
C	-1098633.	45653119	-0.024065	0.9812

R-squared	0.995397	Mean dependent var	1.24E+09
Adjusted R-squared	0.994141	S.D. dependent var	5.96E+08
S.E. of regression	45644568	Akaike info criterion	38.33385
Sum squared resid	2.29E+16	Schwarz criterion	38.52266
Log likelihood	-283.5038	Hannan-Quinn criter.	38.33183
F-statistic	792.8595	Durbin-Watson stat	2.690219
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Eviews 12

Berdasarkan tabel diatas, dapat dibentuk persamaan  $Y = 1.34415842915 * X1 + 0.691980435577 * X2 - 294.342523258 * X3$

#### Uji Parsial (uji T)

Uji Parsial dilakukan untuk menganalisis pengaruh parsial variabel independen, yaitu pajak daerah, terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji t pada tabel, nilai t-statistik untuk pajak

daerah adalah 39.578 dengan nilai prob. Sebesar  $0.0000 < 0.05$  maka bisa disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki nilai t-statistic sebesar 1.404 dengan nilai prob. Sebesar  $0.187 > 0.05$  Akibatnya, dapat dikatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan regional yang berbeda satu sama lain tidak berdampak signifikan pada PAD. PAD tidak terdampak signifikan dari laba BUMD, dengan nilai kemungkinan sebesar  $0.369 > 0.05$ .

#### Uji Simultan (uji F)

Terbukti dari temuan regresi bahwa nilai F-statistika dengan nilai prob 792.859 dan memperoleh nilai statistik F  $0,000 < 0,05$  dapat disimpulkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah, pajak daerah, dan pendapatan BUMD semuanya secara bersamaan mempengaruhi PAD.

#### Dampak Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Analisis data menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pajak daerah adalah kontribusi utama yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah untuk mendanai berbagai proyek pembangunan dan kegiatan operasional yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini memungkinkan daerah untuk memiliki kendali penuh dalam mengatur dan mengembangkan wilayahnya sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat (Alhusain et al., 2018). Data menunjukkan bahwa pajak daerah adalah sumber utama PAD. Peningkatan pajak daerah akan berdampak langsung pada peningkatan PAD secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan daerah, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan.

#### Dampak Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maka PAD akan meningkat begitupun sebaliknya.

#### Dampak Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian tidak menunjukkan hubungan yang signifikan antara keuntungan yang diperoleh BUMD dengan peningkatan PAD. Namun, hal ini tidak serta-merta menyangkal potensi BUMD sebagai sumber pendapatan daerah di masa mendatang. Pertumbuhan ekonomi lokal dan

peningkatan pendapatan daerah secara umum dapat dipengaruhi oleh kinerja BUMD.

#### **Dampak Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah.**

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan laba BUMD secara bersama-sama sangat berpengaruh terhadap PAD di Provinsi NTB. Hal ini wajar, karena ketiganya merupakan sumber utama PAD. Hasil analisis menunjukkan bahwa 99,4% atau hampir seluruh PAD di NTB dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut.

#### **4. KESIMPULAN**

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Laba BUMD tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara simultan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan laba BUMD berpengaruh signifikan terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan besar pengaruh 99,4% dan 6% nya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak tercantum dalam penelitian ini.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat menggunakan penelitian ini sebagai panduan untuk meningkatkan hasil pengelolaan kekayaan daerah, meningkatkan teknik pemungutan pajak, dan memaksimalkan pendapatan BUMD dalam rangka meningkatkan PAD provinsi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aksara. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bumi Aksara. <https://books.google.co.id/books?id=wY8fEA-AAQBAJ>
- Alhusain, Mauleny, Sayekti, & Firdausy. (2018). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=Q6ZeDw-AAQBAJ>
- Ardiyanti, Dirvi Surya Abbas, Seleman Hardi Yahawi, & Samino Hendriyanto. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(4), 76–100.

- <https://doi.org/10.55606/optimal.v2i4.711>
- Berutu, M. I. A., & Erasashanti, A. P. (2023). Analysis of the Influence of Local Tax Revenue, Regional Retribution and Results of Separate Regional Wealth Management on Regional Original Revenue (PAD) of North Sumatra Regency/City. *Indonesian Journal of Economic & Management Sciences*, 1(2), 201–212. <https://doi.org/10.55927/ijems.v1i2.3820>
- Dewi, R. S., & Ratnawati, D. (2023). the Effect of Local Taxes, Local Levies, and Bumd Profits on Increasing Local Original Revenue (Pad) in Pacitan Regency. *International Journal of Economy, Education, and Entrepreneurship*, 3(3), 796–805. <https://doi.org/10.53067/ije3.v3i3>
- Dira, H. M., Azhar, Deli, A., Romano, & Manyamsari, I. (2023). Analisis Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sabang. 5(2), 83–89.
- Dona, E. M., Putri, A. W., Feblin, A., & Andrian Nova, G. D. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Laba Bumd Terhadap Pad Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 8(2), 128–139. <https://doi.org/10.30873/jbd.v8i2.3302>
- Hafandi, Y., & Romandhon, R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 182–191. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337>
- Keintjem, N., Engka, D. S. M., & Walewangko, E. N. (2021). Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris di Kota Manado). *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(2), 36–45.
- Mulyani, H., & Ramdini, S. A. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019. *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 2(2), 151–172. <https://doi.org/10.31949/j-aksi.v2i2.1613>
- Pamungkas, B. D., Suprianto, & Usman. (2023). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi*

- Pembangunan*, 5(2), 90–93.
- Rizalni, R. A. (2023). Berpengaruhkah Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah? *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 1(4), 295–316.
- Siregar, A. A., & Kusmilawaty, K. (2022). Pengaruh Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), 57–68. <https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.553>
- Subarkah, A. R. (2018). Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Sosial Politik*, 4(2), 49. <https://doi.org/10.22219/sospol.v4i2.5979>
- Suharyadi, D., Martiwi, R., & Karlina, E. (2018). Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor. *Jurnal Moneter*, 5(2), 125. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter>
- Wahidin, Mustain, & Yusuf Hasbullah. (2021). Analisis Kapasitas Pajak Daerah Kabupaten Dan Kota Propinsi Nusa Tenggara Barat. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 114–124. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.41>